

# BAB I

## A. Latar Belakang

Sejak di temukannya wabah *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) yang di sebab oleh virus *SARS-CoV2* yang pertama kali di temukan pada akhir tahun 2019 di negara bagian Wuhan, China. Dengan di temukannya wabah tersebut WHO (World Health Organization) mengumumkan bahwa ini termasuk wabah pademi. Pada awal bulan Maret 2020 virus ini pertama kali terdeteksi masuk ke Indonesia. Di lansir dari <https://news.detik.com> berita tanggal 2 Maret 2022 dengan judul Kasus Corona Pertama di Indonesia, Ini Kilas Balik Usai 2 Tahun Berlalu yang di tulis oleh Syahidah Izzata Sabiila menjelaskan bahwa:

“Kasus Corona pertama di Indonesia pertama kali diumumkan pada 2 Maret 2020 lalu oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Mensesneg Pratikno dan Seskab Pramono Anung. Pemerintah mengkonfirmasi kasus 1 dan 2 yang menimpa seorang ibu (64) dan putrinya (31) di Depok, Jawa Barat. Keduanya terinfeksi Corona dari warga negara Jepang yang sempat datang ke Indonesia pada Februari 2020.”

Dengan di umumkannya virus ini sontak membuat keadaan di Indonesia sedikit kacau, lalu pada tanggal 14 Maret 2020, Presiden Jokowi melalui Kepala BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) berdasarkan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2007 menyatakan bahwa Corona Virus atau Covid-19 sebagai bencana nasional. Dengan adanya berita tersebut maka pandemi telah dimulai. Hal ini tentu membuat kegaduhan tak terkecuali di tingkat kalurahan. Secara Kalurahan atau Desa merupakan wilayah administrasi terkecil di Indonesia yang memiliki pemerintahan otonom dan diberikan kewenangan untuk mengurus mengatur semua urusan pemerintahan (Undang-Undang No. 6 tahun 2014) tentang

desa. Dengan begitu memberikan hak kepada desa untuk mengatur sendiri urusan rumah tangganya termasuk mengelola Dana desa yang di dapat Melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dari pemerintah pusat.

Dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut menurut (Pamungkas et al., 2020) setiap desa diharapkan akan mampu mewujudkan terbentuknya desa yang mandiri di mana: (1) Desa bukan hanya sekedar sebagai obyek penerima manfaat, melainkan sebagai subyek pemberi manfaat bagi warga masyarakat setempat; (2) Sebagai komponen desa mempunyai rasa kebersamaan dan gerakan untuk mengembangkan aset lokal sebagai sumber penghidupan dan kehidupan bagi warga masyarakat; (3) Desa mempunyai kemampuan menghasilkan dan mencukupi kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat seperti pangan, energi, layanan dasar dan lain-lain. Hal tersebut tentunya sejalan dengan konsep yang digaungkan oleh pemerintah pusat yaitu membangun Indonesia dari desa. Kemudian untuk membantu mewujudkan hal tersebut, pemerintah menyiapkan dana yang tidak sedikit untuk membantu dalam hal memandirikan suatu desa yang kemudian di sebut dengan dana desa. Dalam (Hidayati, 2016) mengemukakan bahwa Dana Desa yang di dapat oleh desa berhak untuk di pergunakan dan di Kelola oleh pemerintah desa dapat mencapai tujuan yang telah di rencanakan.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease (COVID-19) di tingkat Pedesaan melalui APBDesa, penggunaan Dana Desa berupa anggaran belanja kegiatan tak terduga pada bidang penanggulangan bencana, darurat, dan mendesak yang selama pandemic di alihkan untuk menanggulangi adanya wabah virus covid-19 ini. Pemerintah menganjurkan untuk Pemerintah Desa mengalokasikan dana tersebut

sesuai dengan kegunaan yang ada, baik itu untuk memberikan bantuan berupa uang tunai berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) maupun non-tunai. Hal ini berlaku pada seluruh desa yang ada di Indonesia. Namun bagi desa yang belum mengalokasikan dana desa nya pada bidang tersebut yang di sebabkan karena kekurangan dana desa, maka pemerintah melakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdesa) dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhan sosial dasar warga desa, perubahan ini juga turut mengubah APBDesa.

Menurut (Sandhi & Iskandar, 2020) prioritas penggunaan dana Desa ini termasuk kedalam kegiatan guna menanggulangi dampak ekonomi atas Pandemi COVID-19, yang dalam hal ini disebut dengan BLT. Tak sampai di situ saja bantuan dari pengalokasian dana desa ini juga di alokasikan dalam bentuk yang lain karena pada saat itu yang sesuai dengan intruksi presiden di lakukan pembatasan kegiatan masyarakat. Sehingga pada tingkat desa di laksanakan lockdown mandiri dengan cara sedikit menutup area desa nya masing-masing yang bertujuan untuk sedikit membatasi pergerakan sesuai dengan intruksi dari presiden.

Sehingga beberapa desa yang berada di Indonesia terutama di Kabupaten Sleman tepatnya di Desa Sinduadi Kecamatan Mlati, melakukan penutupan desanya. Dana Desa yang sesuai dengan Intruksi Menteri No. 3 Tahun 2020 di alokasikan untuk penanggulangan pada masa pandemic ini kemudian di gunakan untuk menutup desa. Selain melakukan penutupan, di desa sinduadi juga di lakukan penyemprotan disinfektan secara mandiri guna mensterilkan Kawasan desa, yang pada waktu itu di percaya ampuh.

Dengan demikian, penelitian ini dilakukan untuk memahami secara mendalam bagaimana efektivitas penggunaan dana desa dalam upaya penanggulangan Covid-19 di Kalurahan Sinduadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman pada tahun 2021. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana dana desa telah digunakan dengan tepat dan efisien untuk mengatasi berbagai aspek pandemi, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, penyediaan bantuan langsung, dukungan untuk karantina mandiri, pembelian alat pelindung diri, serta upaya vaksinasi. Melalui analisis yang komprehensif, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pembuat kebijakan, pemerintah desa, dan masyarakat dalam memperbaiki strategi penanggulangan Covid-19 di tingkat lokal.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan . Maka yang diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut Bagaimana Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Penanggulangan Covid-19 Pada Tahun 2021 di Kalurahan Sinduadi, Mlati, Sleman.

## **C. Tujuan Penelitian**

Melihat dari rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Penanggulangan Covid-19 Pada Tahun 2021 di Kalurahan Sinduadi, Mlati, Sleman.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat teoritis

- a. Memberikan tambahan wawasan dalam perkembangan ilmu pengetahuan serta dapat meningkatkan pengetahuan penulis dalam aplikasi dan teori
- b. Diharapkan dapat menambah referensi kepustakaan bagi mahasiswa

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai acuan bagi pemerintah desa terkait dengan penggunaan dana desa selama pandemic sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri
- b. Untuk mengetahui keberhasilan kebijakan maupun program yang dikeluarkan oleh pemerintah desa

## E. Studi Literatur

Berikut akan dijelaskan beberapa tinjauan pustaka yang diambil dari hasil penelitian terdahulu. Kajian pustaka yang dijelaskan tentunya memilih pembahasan yang berkaitan dengan latar belakang masalah pada penelitian ini yaitu berupa efektifitas penggunaan dana desa dalam penanggulangann COVID-19 yang lakukan oleh pemerintah Desa. Beberapa tinjauan pustaka yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

*Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu*

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil penelitian
1	(Sandhi & Iskandar, 2020)	Praktik Pengelolaan Dana Desa untuk Penanganan COVID-19 (Studi pada Desa Bendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar)	Dari jurnal dapat di peroleh bahwa pengeolaan dana Desa Desa Bendo telah sesuai dengan dengan ketentuan yang berlaku pada saat itu. Dalam penyelenggaraannya juga telah melalui prosedur yang telah di tetapkan seperti menggunakan Musrenbang. Dengan begitu dana desa yang di alokasikan guna penanggulangan di masa pandemic ini dapat tersalurkan kepada masyarakat dalam bentuk BLT.
2	(Afita, 2021)	Analisis Pengalokasian Dana Desa Sebelum dan Sesudah Terjadinya Pandem Covid-19 (Desa Rambah Muda, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu)	Dari penelitian tersebut dapat di ambil bahwa penggunaan dana desa di Desa Rambah Muda pada tahun 2020 ini terdapat perubahan yang signifikan. Hal ini tengarai dengan terdapat hamper 40% lebih dana yang di gunakan penanggulangan pandemic <i>Covid-19</i> dan pembagian BLT bagi warga desa yang terdampak secara ekonomi. Sehingga dan yang di alokasikan tersebut di gunakan untuk pengadaan tempat cuci tangan dan penyemprotan disinfektan.

3	(Azhari & Suhartini, 2021)	Efektivitas Dana Desa Untuk BLT Sebagai Bentuk Kesejahteraan Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19	Dari penelitian dapat di peroleh bahwa di masa pandemic tersebut dana desa tahun 2020 yang di prioritaskan untuk bantuan angsung tunai terbukti sangat membantu masyarakat yang terdampak secara ekonomi, namun dalam pemanfaatannya terbukti belum dapat berjalan secara maksimik di karenakan warga yang menerima terus menerus tanpa di kembangkan dalam hal berwirausaha.
4	(Valentina et al., 2020)	Analisis Pemanfaatan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Nagari Talang Anau Kabupaten Lima Puluh Kota	Dari hasil penelitian dapat di peroleh bahwa Desa Nagari Talang Anau menurut Permendes No 6 Tahun 2020 telah membagi pengalokasian dana desa menjadi 3 bagian, yakni, pertama untuk mengedukasi masyarakat terkait pencegahan Covid-19. Kedua membentuk posko Covid-19. Ketiga di alokasikan dalam bentuk bantuan langsung tunai atau BLT.
5	(Rahayu & Sugiri, 2021)	Penyaluran Dan Penggunaan Dana Desa Dalam Masa Pandemi Covid-19	Dari hasil penelitian adalah dalam hal penyaluran sudah sesuai dengan ketentuan namun di karenakan terdapat pandemic Covid-19 maka pengalokasian dana desa tersebut yang awal nya akan di gunakan untuk pembuatan jalan desa kemudia di prioritaskan guna membantu masyarakat dalam hal ekonomi yakni Bantuan langsung tunai atau BLT.
6	(Yunika et al., 2022)	Efektivitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebelum dan pada masa pandemi covid-19 di Desa Tanjung	Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa dan diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan

		Medang Kecamatan Kelekar Kabupaten Muara Enim	metode kualitatif, sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan tiga cara yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa dilakukan dengan efektif, namun masih ditemukan beberapa kendala. Pelaksanaan pembangunan diperuntukkan untuk kepentingan umum yang berbentuk nyata seperti infrastruktur dan fasilitas. Dalam pengelolaan dana desa seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, masyarakat selalu dibantu oleh pihak kecamatan dalam membuat laporan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban yang menyebabkan kurangnya kemandirian desa.
7	(Kasim et al., 2021)	PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMANFAATAN PENGALIHAN DANA DESA UNTUK PANDEMI COVID 19	Dengan berdasarkan Menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi mengeluarkan Peraturan Menteri Desa nomor 6 tahun 2020 tentang pengalihan dana desa untuk pandemi covid 19. Peran dari pemerintah desa dalam pengalihan dana desa untuk pandemi covid 19 ini sangat penting, guna mengawasi dan mendistribusikan dana desa yang di alihkan menjadi bantuan langsung tunai ( BLT ) agar sampai kepada masyarakat.
8	(Wonok, 2020)	STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM PENCEGAHAN	Di desa Mokobang pemerintah desa dalam hal penanganan pandemic COVID-19, melakukan beberapa strategi, diantaranya memaksimalkan berbagai sumber daya yang



		PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19)	dimiliki baik itu yang diberikan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, bahkan partisipasi masyarakat. Strategi yang juga pemerintah desa seperti membuat pos penjagaan keluar masuk orang, mewajibkan masyarakat yang masuk ke desa mencuci tangan, dan mewajibkan surat kewaspadaan bagi orang yang berasal dari luar kecamatan Modoinding. Bahkan
9	(Pamungkas et al., 2020)	PENGGUNAAN DANA DESA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN SUMBAWA	Dengan metode deskriptif, Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan penggunaan dana desa tahun anggaran 2020 dalam penanganan covid-19 di kabupaten Sumbawa meliputi (1). Penggunaan dana desa untuk Pencegahan dan penanganan Covid-19; (2). Padat Karya Tunai Desa; (3). Bantuan Langsung Tunai Desa. Untuk
10	(Sasongko et al., 2020)	OPTIMALISASI PERAN DESA DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI DESA PRANGKO'AN KABUPATEN MAGELANG	Penelitian ini berdasarkan Riwayat pengabdian dari penulis tentang bagaimana mengedukasi masyarakat Desa Prangko'an Kabupaten Magelang mengenai perlindungan diri serta mencegah agar virus <i>Covid-19</i> ini tidak menyebar luas.
11	(Azizah & Prabawati, 2021)	Implementasi Kebijakan Dana Desa Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 di Desa Sukowidodo Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung	Berdasarkan penelitian secara deskriptif peneliti mngemukakan bahwasannya rangka penanganan pandemi Covid-19 salah satunya melalui pengalokasian Dana Desa. Kegiatan pengalokasian Dana Desa disesuaikan dengan Permendesa Nomor 6 Tahun 2020 yakni penanganan Covid-19, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Salah satu desa yang

			menggunakan Dana Desa untuk Covid-19 adalah Desa Sukowidodo Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung.
12	(Hartati & Fathah, 2022)	Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Masa Pandemi Covid-19	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menemukan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pringgasela Selatan secara teknis dan administrasi sudah baik berdasarkan ketepatan waktu pencairan Alokasi Dana Desa. Tingkat
13	(Fanani et al., 2022)	Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Menanggulangi Dampak Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Ngawi Abdul	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dana desa dalam menanggulangi dampak pandemi covid-19 di desa Ringinanom berjalan sesuai ketentuan. Alokasi anggaran dana desa sebesar minimal 8% direalisasikan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa pemerintah desa dan masyarakat telah melaksanakan kegiatan penanggulangan dampak pandemi covid-19 di desa dengan dukungan dari anggaran dana desa yang bersumber dari APBN.
14	(Purwadinata et al., 2021)	ANALISIS PENGGUNAAN DANA DESA PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Desa Sebasang Kecamatan Moyo Hulu)	Dari hasil penelitian di dapat informasi bahwa prioritas penggunaan dana desa di Desa Sebasang tahun 2020 adalah untuk membiayai dua program desa, yaitu Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dan membentuk tim relawan lawan Covid-19 yang bertujuan untuk memutus mata rantai

			penyebaran Covid-19 di wilayah Desa Sebasang.
15	(Fanisa & Ma'ruf, 2021)	Pemanfaatan Dana Desa Bagi Warga Terdampak Pandemi Covid-19 (Studi Desa Bohar, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo)	Dari penelitian dapat di peroleh bahwa, Untuk melakukan tindakan pencegahan dan penanganan Desa Bohar membentuk tim relawan dan mendirikan pos jaga sejumlah 6 pos dimasing-masing dusun di Desa Bohar. Kegiatan pencegahan yang dilakukan oleh tim relawan Covid-19 masih belum maksimal karena masih banyak kegiatan di Desa Bohar yang tidak mematuhi protokol kesehatan seperti di masjid dan balai desa. Selain itu Desa Bohar memfasilitasi proses isolasi mandiri dengan bekerja sama dengan RSUD Sidoarjo dan Puskesmas Taman.
16	(Fitralisma & Ernitawati, 2021)	Kualitas Pelayanan Aparatur Desa Saat Situasi Pandemi Covid-19 Terhadap Tingkat Kepuasan Masyarakat Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dari Kementerian Desa	Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui hubungan kualitas pelayanan yang terdiri dari keandalan (realibility), jaminan (assurance), bukti fisik (tangible), empati (emphaty), dan daya tanggap (responsiveness) dengan kepuasan masyarakat dalam penyaluran program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) yang berasal dari Kementerian Desa. Penelitian ini dilakukan pada Desa Cikakak Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes.
17	(Salsa Nabila & Ramadani Silalahi, 2022)	Optimalisasi Good Governance Dalam Meningkatkan Pengelolaan Anggaran Pemerintah Ke Desa Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Desa Bela Rakyat, Langkat)	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasannya pemerintah telah bertanggung jawab serta transparan menyalurkan anggaran pada saat pandemi covid 19 kepada Desa Bela Rakyat. Sehingga pihak desa pun dapat menerapkan hal yang sama yaitu dengan

			transparan menyalurkan anggaran yang diberikan pemerintah
18	(Fitryani et al., 2021)	Implementasi Penggunaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Baru Tahan Tahun 2020	Dari hasil penelitian terdapat 3 fokus utama penggunaan Dana Desa pada masa pandemic covid- 19 di Desa Baru Tahan, yakni untuk BLT-DD, penyemprotan disinfektan di sekitar desa, dan dana desa digunakan dengan pola PKTD melalui pengelolaan secara swakelola dan menggunakan SDA dan SDM desa. Para pekerja di prioritaskan untuk warga yang kurang mampu.
19	(Martajaya & Sugiri, 2021)	Implementasi Penyaluran Dan Penggunaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus Desa Karanganom Kabupaten Klaten	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran dan penggunaan atas Dana Desa pada tahun 2020 yang disalurkan ke RKD (Rekening Kas Desa) Desa Karanganom lebih difokuskan untuk menangani pandemi Covid-19 sesuai amanat menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 dan Peraturan Bupati Klaten Nomor 2 Tahun 2020. Penggunaan Dana Desa dalam penanganan pandemi lebih dari setengah dari total alokasi Dana Desa pada tahun 2020.
20	(Murniati et al., 2021)	Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Era Pandemi Covid-19 Desa Bakalan Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengelolaan alokasi dana desa pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban telah mengikuti petunjuk teknis yang ada pada peraturan perundang-undangan dan telah menerapkan tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah. Namun pada tahap pelaporan masih belum

			begitu baik dikarenakan bukti terlampir tidak di lampirkan sehingga kurang efektif.
--	--	--	---

Berdasarkan pada beberapa penelitian diatas, penulis lalu menarik kesimpulan bahwa focus dalam penelitian sebelumnya lebih mengarah pada penggunaan dana desa secara umum yang dilakukukan oleh pemerintah Desa . Adapun terkait dengan penelitian diatas, penulis akan melakukan hal yang berbeda dengan kebanyakan penelitian sebelumnya dengan menambahkan pembaruan terkait dengan dana desa untuk penanggulangan COVID-19 yang berupa Efektifitas Penggunaan Dana Desa Dalam Penanggulangan Covid-19 Tahun 2021 di Kalurahan Sinduadi, Mlati, Sleman.

## **F. Kerangka Dasar Teori**

### **1. Efektivitas**

Efektivitas pada umumnya selalu dihubungkan dengan efisiensi dalam pencapaian tujuannya baik dari segi individu, kelompok, maupun organisasi. Sedangkan menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti “ada efeknya” (akibatnya, pengaruhnya, kesannya ); “manjur atau mujarab “ (obat); “dapat membawa hasil atau berhasil guna” (usaha, tindakan ); “mulai berlaku”( Undang-Undang, Peraturan ) (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 2003;284). Efektifitas bertujuan untuk melihat sejauh mana setiap alternatif kebijakan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Untuk menilai efektifitas bisa membandingkan tujuan awal

dengan tujuan yang berhasil dicapai. Efektivitas dapat diukur dari unit produk atau layanan sebuah kebijakan.

Sementara Menurut Sondang P. Siagian (2001:24) “Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya”. Sedangkan Hidayat (1996) mengungkapkan bahwa, “Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai”. Pendapat tersebut juga senada dengan pendapat Dunn (2003:429) yang menyebutkan efektivitas (effectiveness) berkenaan dengan suatu alternative apakah mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Selanjutnya, Dunn (2000:601) menambahkan bahwa efektivitas merupakan kriteria evaluasi yang mempertanyakan apakah hasil yang diinginkan sebelumnya telah tercapai.

Sedangkan menurut pendapat dari Emerson dalam Hadayaningrat mengatakan “efektivitas merupakan suatu pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau ujuan yang sudah ditentukan”. Maka dengan penjelasan tersebut dapat kita artikan bahwa ketika tujuan telah tercapai, baru dapat kita katakana efektif. Pada buku yang sama juga pendapat tersbut juga dipertegas oleh pendapat Hasibuan dalam Hadayaningrat yang mana dijelaskan bahwa ”efektivitas adalah kondisi tercapainya suatu sarana eksplisit dan implisit” (Handayaningrat,1996:16).

Efektivitas menurut Nurchana (2014: 356) merupakan suatu pengukuran dengan suatu tingkat keberhasilan dari suatu organisasi,

aktivitas maupun suatu program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan pendapat dari Satries (dalam Nurchana, 2014: 356) menyebutkan bahwa efektivitas adalah keterkaitan antara keluaran/ output dengan sasaran dimana harus dicapai, yaitu semakin besar suatu kontribusi keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka sudah dapat dikatakan bahwa unit tersebut efektif.

Menurut Martani dan Lubis (1987:55) terdapat 3 pendekatan dalam mengukur suatu tingkat efektivitas dalam suatu program maupun kebijakan yaitu sebagai berikut:

- a. Pendekatan sumber (*resource approach*)
- b. Merupakan pengukuran efektivitas dari input. Pendekatan ini mengutamakan dengan adanya keberhasilan program atau kegiatan dengan tujuan untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun non fisik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang diinginkan.
- c. Pendekatan proses (*process approach*)
- d. Dalam pendekatan ini digunakan untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan yang dilakukan.
- e. Pendekatan sasaran (*goals approach*)
- f. Dimana pusat perhatian pada output, untuk mengukur keberhasilan program untuk mencapai hasil (output) yang sesuai dengan rencana yang ada.

Menurut Campbell J.P.,1970 (dalam Lestanata & Pribadi, 2017:373) Terdapat beberapa kriteria untuk mengukur sebuah tingkat efektivitas dalam

suatu program, kebijakan, organisasi atau lainnya. Berikut beberapa komponen yang berfungsi guna mengukur efektivitas

- a. Keberhasilan program
- b. Keberhasilan sasaran
- c. Kepuasan terhadap program
- d. Tingkat input dan output
- e. Pencapaian tujuan menyeluruh.

Sedangkan menurut William N. Dunn (2003:430) menyebutkan beberapa indikator-indikator yang dapat dijadikan alat untuk melihat tingkat efektivitas, yaitu terdapat 5 sebagai berikut:

- a. Efisiensi

Efektivitas dan efisiensi sangatlah berhubungan, sebab apabila kita berbicara tentang efisiensi tentunya kita membayangkan tentang hal penggunaan sumber daya (resources) kita secara optimal guna mencapai suatu tujuan tertentu. Maksudnya adalah efisiensi akan terjadi jika penggunaan sumber daya diberdayakan secara optimal sehingga suatu tujuan akan tercapai. Apabila sasaran yang ingin dicapai oleh suatu program atau kegiatan ternyata sangat sederhana sedangkan biaya yang dikeluarkan terlampaui besar dibandingkan dengan hasil yang dicapai. Ini berarti kegiatan telah melakukan pemborosan dan tidak layak untuk dilaksanakan.

- b. Kecukupan

Kecukupan dapat dikatakan sebagai tujuan yang telah dicapai sudah dirasa mencukupi dalam berbagai hal. Dunn mengungkapkan bahwa



sebuah kecukupan (adequacy) berkenaan dengan seberapa besar suatu tingkat efektivitas dapat memuaskan kebutuhan, kesempatan atau nilai yang menumbuhkan adanya masalah. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan melihat atau juga memprediksi seberapa besar alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi pada masyarakat.

c. Pemerataan

Pemerataan dalam program atau kegiatan dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran. Dunn menyatakan bahwa kriteria kesamaan (equity) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya dan manfaatnya merata. Kunci dari suatu pemerataan adalah keadilan atau kewajaran.

d. Responsivitas

Responsivitas dapat diartikan sebagai respons dari suatu aktivitas baik yang telah dilaksanakan maupun tahap perencanaan. Menurut Dunn menyatakan bahwa responsivitas (responsiveness) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Suatu keberhasilan kegiatan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan

terjadi jika suatu kegiatan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kegiatan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan.

e. Ketepatan

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Ketepatan dapat diisi oleh indikator keberhasilan kebijakan lainnya (bila ada). Misalnya dampak lain yang tidak mampu diperkirakan sebelumnya, baik itu dampak tak terduga secara positif maupun negatif atau juga dimungkinkan alternatif lain yang dirasakan lebih baik dari suatu pelaksanaan kebijakan sehingga kebijakan bisa lebih dapat bergerak secara lebih dinamis.

Berdasarkan pengertian dari David Krech, Ricard S. Cruthfied dan Egerton L Ballachey dalam Danim, 2004 (dalam Firmansyah, 2009: 39- 40) mengatakan ada beberapa komponen untuk pengukuran tingkat efektivitas.

- a. Jumlah yang dihasilkan
- b. Tingkat kepuasan yang dirasakan dari sebuah progam maupun kebijakan yang dihasilkan.
- c. Produk yang dihasilkan yang mana merupakan kondisi yang menumbuhkan kefetivitas kerja.
- d. Tingkat itensitas yang ingin dicapai yang mana kita melihat tingakat tingginya isentisitas progam maupun kebijakan.

## **2. Kebijakan Publik**

Kebijakan public merupakan suatu jalan guna mencapai suatu tujuan yang kita cita citakan. Menurut Carl Federick sebagaimana di kutip dalam Leo Agustino mengatakan bahwa kebijakan public merupakan suatu rangkaian sebuah tindakan ataupun aktivitas yang diusulkan seseorang, kelompok, organisasi, atau pemerintah dalam suatu tempat atau lingkungan tertentu yang mana terdapat suatu hambatan atau kesulitan serta kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan guna mencapai suatu tujuan. Maka dengan pendapat ini dapat dikatakan bahwa suatu ide kebijakan akan melibatkan pelaku yang memiliki maksud dan tujuan.

Sedangkan menurut Eyestone sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008 : 6) mengartikan bahwa kebijakan public merupakan suatu hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya. Namun pendapat tersebut menurut para ahli dianggap masih terlalu luas untuk dikatakan sebagai salah satu definisi dari kebijakan public.

Menurut Woll sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003:2) kebijakan public dapat didefinisikan sebagai aktivitas atau kegiatan suatu pemerintah dalam memecahkan suatu permasalahan yang sedang dialaminya baik secara langsung maupun tidak langsung. Dari pengertian tersebut dapat kita artikan bahwa kebijakan merupakan suatu tindak yang muncul ketika terjadi permasalahan serta berfungsi untuk menyudahi masalah tersebut.

Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn sebagaimana dalam dikutip Budi Winarno (2007: 32-34) adalah sebagai berikut:

a. Tahap penyusunan agenda

Pada tahap ini adalah awal proses perumusan suatu masalah menjadi suatu kebijakan public. Dimana pada tahap ini akan suatu pemilihan permasalahan yang akan di angkat sebagai focus pembahasan kebijakan.

b. Tahap Formulasi Kebijakan

Pada tahap yang kedua ketika ketika suatu permasalahan telah masuk kedalam agenda maka dibahaslah oleh para pembuat kebijakan. Dalam tahap ini adalah guna mencari suatu jalan keluar dalam suatu masalah yang telah diambil.

c. Tahap adopsi kebijakan

Ketika sudah munculnya berbagai jalan keluar dari permasalahan maka hanya akan diambil satu yang terbaik oleh pembuat kebijakan. Hingga pada hanya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas 21 legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan peradilan.

d. Tahap implementasi kebijakan

Tahap implementasi kebijakan dimana dalam hal ini kebijakana yang sudah diambil akan dilaksanakan oleh beberapa unit-unit administrasi yang berkepentingan.

e. Tahap Evaluasi Kebijakan

Tahap evaluasi yang mana dalam tahap ini guna melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat terhadap dampak yang diinginkan. Atau sejauh

mana dampak dari kebijakan ini terhadap masyarakat atau permasalahannya.

### **3. Pemerintah desa**

Pemerintah Desa merupakan suatu penyelenggara dalam bidang pemerintahan serta kepentingan rakyat umum yang bertempat pada wilayah tersebut. Dapat dikatakan desa karena memiliki system pemerintahannya sendiri yang mana dinamakan pemerintah Desa. Didalam Pemerintah Desa berisikan kepala Desa yang dibantu oleh perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan dalam pemerintahan Desa. Menurut Soemantri (2010:7) pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, sedangkan perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat lainnya, yaitu sekretariat desa, pelaksanaan teknis lapangan dan unsur kewilayahan, yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat.

Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Bab I pasal 1 menyebutkan bahwa, “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia”. Dengan kata lain, Pemerintah Desa merupakan satuan organisasi paling terendah yang juga kepanjangan tangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten yang berdasarkan asas

dekonsentrasi yang kedudukannya dibawah Pemerintah Kecamatan, dan bertanggungjawab langsung terhadap perintah dari Pemerintah Kecamatan. Pemerintah Desa merupakan unsur penyelenggara seluruh aspek pemerintahan di Desa.

Pemerintahan Desa merupakan suatu sistem penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa atau yang biasa disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa serta Perangkat Desa sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan desa (Hendro Pujo S. A., 2013:1376).

Menurut Heriyanto (2015) Pemerintah Desa merupakan organisasi dari penyelenggaraan yang mana terdiri dari:

a. Kepala Desa / Lurah

Kepala desa merupakan suatu pimpinan tertinggi didalam suatu penyelenggaraan pemerintah Desa, pelaksanaan dalam pembangunan demi kemajuan Desa, pembinaan serta pemberdayaan terhadap masyarakat Desa. Yang mana kepala Desa memiliki unsur peran yang begitu penting dalam proses pemerintahan desa.

b. Perangkat Desa

Perangkat desa merupakan suatu perangkat yang bertugas untuk membantu kepala Desa dalam menjalankan tugas serta wewenangnya

dan dalam menjalankan tugasnya perangkat desa bertanggungjawab langsung kepada Kepala Desa. Perangkat desa terdiri dari sebagai berikut:

- 1) Sekertaris Desa / Carik atau biasa kita sebut dengan carik merupakan staf desa yang bertugas untuk membantu kepala Desa dengan jabatan dibawah kepala Desa/Lurah.
- 2) Pelaksanaan kewilayahan staf yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bagian kewilayahan.
- 3) Pelaksanaan teknis merupakan staf yang bertugas untuk membantu Kepala Desa dalam operasional terhadap desa dan masyarakat.
- 4) Badan Permusyawarahan Desa adalah wujud dari system demokrasi yang berada pada suatu pemerintah Desa. BPD merupakan badan yang bertugas untuk mengawasi terhadap kinerja dari kepala Desa serta guna menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan yang terakhir untuk membahas juga menyepakati sebuah rancangan peraturan desa bersama Lurah.

## **G. Definisi Konseptual**

### **1. Efektivitas**

Efektivitas merupakan suatu pengukuran untuk melihat seberapa besara target yang dicapai dari sebuah progam maupun kebijakan yang telah dibuat oleh pemeritah ataupun pembuat dari progam maupun kebijakan tersebut, serta guna membandingkan antara tujuan atau target yang dihasilkan dengan tujuan awal yang diinginkan.

## 2. Kebijakan Publik

Kebijakan public merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi yang bertujuan untuk mencari suatu alternative guna keluar dari suatu permasalahan yang sedang dihadapinya.

## 3. Pemerintah Desa

Pemerintah Desa merupakan satuan oragnisais dengan tingkat paling rendah dalam suatu pemrintahan dalam Negara yang mana membawai masyarakat secara langsung tanpa adanya perantara sehingga pemrintah desa sebagai penyelenggara.

## H. Definisi Operasional

*Tabel 1.2 Definisi Operasional Menurut William N. Dunn*

Variable	Indikator	parameter
Efektivitas penggunaan dana desa dalam penanggulangan Covid-19 Tahun 2021	Efisiensi	1. Kefektivitasan dalam hal pengalokasian dana desa program penanggulangan covid-19 2. ketersediaan sarana dan prasarana.
	Kecukupan	1. dalam pelaksanaan pengalokasian ini sudah sesuai dengan keputusan permendes 2. hambatan dalam pelaporan yang kurang efektif
	Pemerataan	1. sasaran yang akan di capai sudah sesuai dengan rencana awal



	Responstivitas	1. dampak yang dirasakan oleh masyarakat terhadap pengalokasian dana desa di masa pandemi
		1. Tanggapan masyarakat Kalurahan Sinduadi terhadap penggunaan dana desa
	Ketepatan	1. Masyarakat merasa terbantu dengan bantuan dana desa ini. 2. Terkendalinya penyebaran virus Covid 19.

## I. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang sistematis guna menyusun ilmu pengetahuan (Suryana, 2010). Pada dasarnya penelitian digunakan untuk menunjukkan kebenaran dan pemecahan masalah atas apa yang menjadi kajian penelitian untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk mendekati permasalahan yang diteliti dan menemukan jawabannya diperlukan suatu metode penelitian yang memadai. Maka dalam Penelitian ini secara spesifik akan menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengertiannya penelitian metode kualitatif sendiri menurut Denzin & Lincoln (2011: 3-4) dalam (Ridho Al-Hamdi, Sakir, Suswanta, Muhammad Eko Atmojo, 2020) adalah suatu upaya dalam melakukan penafsiran, interpretasi, dan rasionalisasi terhadap realitas kehidupan berdasarkan dengan yang

diteliti oleh seorang peneliti. Kemudian dalam penelitian ini akan mengungkap mengenai realita atau kejadian yang ada sesungguhnya, maka dengan hal tersebut itu peneliti akan memilih pendekatan dengan studi kasus. Menurut (Creswell, 2014) pendekatan studi kasus menempatkan peneliti untuk dapat mengungkap dengan cermat dan teliti mengenai suatu proses, peristiwa, kegiatan, aktivitas, ataupun program sebagai upaya dari penelitian yang dijalankannya.

### 1.1. Jenis Penelitian

Dalam Penelitian ini peneliti akan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dengan menggunakan metode kualitatif, sang peneliti diharapkan dapat mencerna serta memahami indikasi dari permasalahan yang ditelitinya (Soerjono Soekanto, 1982 : 32). Pada selanjutnya, pendekatan yang kami lakukan yaitu dengan pendekatan deskriptif, dan studi kasus. Pendekatan deskriptif merupakan sebuah metode penelitian yang menjelaskan sebuah peristiwa yang masih terjadi sampai saat ini ataupun waktu lampau (Sujana dan Ibrahim, 1989 : 65). Menurut Faisal (1992:18) metode penelitian deskriptif dimaksudkan sebagai suatu upaya eksplorasi dan kualifikasi tentang bentuk fenomena sosial yang terjadi. Penelitian kualitatif merupakan suatu metode yang berusaha guna memecahkan masalah yang dihadapi pada situasi sekarang. Penelitian kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang tidak dapat dicapai hasilnya melalui prosedur statistic atau melalui cara-cara dari kuantifikasi atau (pengakuan).

## 1.2 Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini sendiri akan dilakukan di Kalurahan Sinduadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman. Untuk alasan pemilihan lokasi tersebut didasari dari berbagai alasan antara lainya adalah karena Kalurahan Sinduadi merupakan tempat tinggal peneliti itu sendiri sehingga di harapkan mampu untuk mengenali seperti apa penggunaan dana desa di Kalurahan Sinduadi sendiri setelah di keluarkannya instruksi oleh Menteri dalam negeri (Mendagri).

## 1.3. Jenis Data

### a. Data Primer

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan jenis data primer. Data primer sendiri yang digunakan berupa hasil dari wawancara dengan Lurah Kalurahan Sinduadi. Dengan hal bermaksud untuk melihat seberapa efektifnya penggunaan dana desa di Kalurahan Sinduadi.

### b. Data Skunder

Dalam penelitian ini peneliti juga akan menggunakan data jenis skunder. Yang mana data skunder dapat diperoleh dari berbagai sumber sumber seperti buku, jurnal, serta melalui surat kabar yang masih berkaitan dengan pokok penelitian yang digunakan. Data skunder untuk penelitian akan didapat dari dokumen maupun jurnal serta Media yang memiliki keterkaitan dengan upaya pemerintah desa dalam penanganan serta memutus rantai penyebaran covid 19.

*Tabel 1.3 Data Primer*

No	Jenis Data	Sumber
1	Data Primer	Data primer di peroleh dari hasil wawancara dengan Lurah Desa Sinduadi yang selanjutnya diarahkan ke Kaur. Pangripta dan Jogoboyo

*Tabel 1.4 Data Sekunder*

No	Jenis Data	Sumber
1	Data Sekunder	Data skunder untuk penelitian akan didapat dari dokumen maupun jurnal serta Media yang memiliki keterkaitan dengan upaya pemerintah desa dalam penanganan serta memutus rantai penyebaran covid 19.

#### 1.4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu langkah yang paling strategis dan utama dalam suatu penelitian, karena tujuan dari penelitian itu sendiri adalah tentang mendapatkan data (Sugiyono,2015). Karena dengan tanpa adanya teknik pengumpulan data maka peneliti diyakini tidak akan memperoleh atau

mendapatkan data yang standar untuk penelitian. Berikut merupakan teknik pengumpulan data :

**a. Observasi**

Observasi merupakan salah satu teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yang berupa datang langsung atau secara langsung melihat kondisi lapangan yang akan digunakan untuk penelitian kemudian mencatat secara sistematis terkait subyek dan obyek yang sudah diamati. Maka dengan hal ini peneliti akan mengamati hal hal yang terkait dengan efektifnya penggunaan dana desa di Kalurahan Sinduadi baik secara lokasi serta sarana dan prasarana .

**b. Wawancara**

wawancara merupakan percakapan dengan tujuan tertentu. Dalam sebuah wawancara dilakukan oleh dua pihak yaitu adalah pihak pewawancara yang memberikan pertanyaan dan terwawancara atau yang memberikan tanggapan atas pertanyaan yang sedang diberikan (Moleong,2017). Dalam wawancara ini menggunakan pihak pihak informann yang sudah dutetapkan sehingga hal tersebut dapat dijadikan sebagai bahan acuan. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa tokoh yang akan diwawancarai terkait focus dalam penelitian.

*Tabel 1.5 Daftar Informan*

<b>Irfoman</b>	<b>Jabatan</b>
Pemerintah Kalurahan Sinduadi	<b>Lurah Sinduadi</b> <b>Kaur. Pangripta</b> <b>Jogoboyo</b>

### **c. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan salah satu cara untuk mencari data berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, website, jurnal, ataupun peraturan perundang-undangan dsb (Arikunto, 2006). Studi dokumentasi ini dijadikan sebagai pelengkap dari metode observasi, serta wawancara pada penelitian kualitatif (Sugiyono,2016). Serta dokumentasi yang diambil selama olah data yang telah dilakukan. Maka dengan itu peneliti akan menggunakan data sekunder baik dari dokumen dari pemerintah desa terkait penggunaan dana desa itu sendiri.

### **J. Analisis Data**

Analisis data adalah suatu kegiatan penelitian yang mana merupakan proses dalam penyusunan serta pengelolaan data yang menggunakan penafsiran data dan telah diperoleh. Menurut Sugiyono(2015) analisis data merupakan suatu kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain yang sudah terkumpul.

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini berupa teknik Triangulasi. Teknik Triangulasi merupakan model pengumpulan data dengan memperoleh hasil dengan melalui pengambilan data yang telah ada dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahap penelitian. Dalam teknik analisis data meliputi beberapa hal yaitu sebagai berikut : pengumpulan data, reduksi data, serta penyajian data yang telah didapatkan.

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan Data Merupakan tahap sistematis guna mendapatkan data yang akan dibutuhkan baik data primer maupun data Sekunder. Cara pengumpulan data selalu berhubungan dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Pada tahap ini akan menggabungkan berapa data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, serta dokumentasi.

b. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu proses pemilihan, pemfokusan perhatian hingga penyederhanaan data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis yang ada di lapangan. Dalam hal ini akan dilakukan secara terus menerus selama kegiatan penelitian ini berlangsung. Maksud dari reduksi data ini adalah tahap merangkum serta memilih hal-hal yang penting agar dapat lebih focus terhadap permasalahan yang akan diteliti. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi yakni membuat ringkasan, menelusuri tema, menulis memo.

c. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sebuah tahap setelah reduksi data yang mana merupakan sekumpulan informasi yang tersusun serta memberi kemungkina dengan adanya penarikan kesimpulan. Tahap ini dilakukan oleh si peneliti guna memperoleh data dalam penelitian kualitatif yang mana berbentuk narasi sehingga perlu penyederhanaan tanpa dengan mengurangi isinya.

d. Penarikan Kesimpulan

Dan yang terakhir adalah tahap penarikan kesimpulan yang mana ditandai dengan penarikan data yang telah ditampilkan sejauh pemahaman dan interpretasi peneliti. Pada tahap ini penelitian akan mengemukakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh selama melakukan penelitian lapangan. Pemeriksaan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu merupakan teknik perbandingan informasi dari informan yang satu dengan informan yang lain atau bias kita katakana dengan membandingkan data yang lapangan serta data yang ada.